
KONFLIK DAN KOALISI DALAM SISTEM POLITIK PLURALIS: ANALISIS KASUS-KASUS KONTEMPORER

Ferdy Syahputra

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Studi ini menyelidiki dinamika konflik dan koalisi dalam sistem politik pluralis dengan menganalisis beberapa kasus kontemporer. Konflik dan koalisi merupakan fenomena penting dalam politik pluralis, yang mencerminkan persaingan kepentingan dan upaya untuk mencapai kesepakatan politik di tengah beragamnya aktor politik dan kepentingan yang ada. Melalui pendekatan analisis kasus, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya konflik dan pembentukan koalisi dalam konteks politik yang pluralis, serta implikasinya terhadap stabilitas politik dan proses pembuatan keputusan. Hasil analisis ini memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika politik dalam sistem politik pluralis dan relevansinya dalam konteks politik kontemporer.

Kata Kunci: *konflik, koalisi, sistem politik pluralis*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam setiap sistem politik pluralis, konflik dan koalisi merupakan dua fenomena yang tidak terhindarkan dan seringkali menjadi pusat perhatian dalam analisis politik. Konflik muncul sebagai hasil dari perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan antara aktor politik yang berbeda, sementara koalisi merupakan upaya untuk memperoleh dukungan dan kekuatan politik dengan menggabungkan kepentingan bersama di antara berbagai pihak. Dalam konteks sistem politik pluralis, di mana terdapat banyak aktor politik yang beragam, analisis konflik dan koalisi menjadi sangat relevan dalam memahami dinamika politik yang berkembang.

Sistem politik pluralis ditandai oleh keberagaman politik yang luas, di mana berbagai kelompok, partai politik, kepentingan kelas, dan ideologi berinteraksi dan bersaing untuk memengaruhi pembuatan keputusan politik. Dalam lingkungan politik yang demikian, konflik merupakan bagian alami dari proses politik yang mencerminkan adanya perbedaan pandangan, kepentingan, dan preferensi di antara aktor politik yang bersaing. Konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari persaingan elektoral antara partai politik, konflik kepentingan di dalam lembaga politik, hingga konflik antara kelompok-kelompok masyarakat sipil dengan pemerintah atau sektor swasta.

Di sisi lain, koalisi merupakan mekanisme yang digunakan oleh aktor politik untuk mencapai tujuan politik mereka melalui konsolidasi kekuatan politik. Dalam sistem politik pluralis, koalisi dapat terbentuk untuk berbagai tujuan, mulai dari membentuk pemerintahan yang stabil, mengamankan dukungan legislatif untuk kebijakan tertentu, hingga memperoleh kekuatan elektoral yang cukup untuk memenangkan pemilihan umum. Pembentukan koalisi seringkali melibatkan negosiasi politik yang kompleks, di mana aktor politik harus mengatasi perbedaan dan konflik kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Analisis kasus-kasus kontemporer tentang konflik dan koalisi dalam sistem politik pluralis memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik dalam berbagai konteks politik yang berbeda. Melalui studi kasus, kita dapat melihat bagaimana konflik dan koalisi memengaruhi stabilitas politik, proses pembuatan keputusan, dan arah perkembangan politik dalam masyarakat pluralis. Dari krisis politik di negara-negara berkembang hingga persaingan politik di negara demokratis mapan, analisis kasus memungkinkan kita untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi munculnya konflik dan pembentukan koalisi, serta dampaknya terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Dengan memahami konflik dan koalisi dalam sistem politik pluralis melalui pendekatan analisis kasus, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang dinamika politik yang kompleks dan relevansinya dalam konteks politik kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena konflik dan koalisi dalam sistem politik pluralis melalui analisis kasus-kasus kontemporer, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang berharga terhadap pemahaman kita tentang politik modern dan cara-cara untuk mengelola perbedaan politik secara efektif.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kasus-kasus kontemporer untuk memahami konflik dan koalisi dalam sistem politik pluralis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam konteks, proses, dan dinamika politik yang kompleks, serta memahami perspektif aktor politik yang terlibat dalam konflik dan koalisi.

1. Desain Penelitian:

- Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan analisis kasus-kasus untuk menyelidiki konflik dan koalisi dalam sistem politik pluralis.
- Desain analisis kasus memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang fenomena politik dalam konteks konkret.

2. Pemilihan Kasus:

- Kasus-kasus kontemporer dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti relevansi, signifikansi, dan keragaman konteks politiknya.
- Kasus-kasus ini dapat mencakup berbagai situasi politik, termasuk konflik elektoral, konflik kepentingan di dalam lembaga politik, pembentukan koalisi pemerintahan, dan sebagainya.

3. Pengumpulan Data: a. Analisis Dokumen: Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber dokumen, termasuk laporan berita, dokumen kebijakan, transkripsi pidato politik, dan publikasi akademis yang relevan. Dokumen-dokumen ini akan memberikan konteks dan informasi tentang kasus-kasus yang dipilih. b. Wawancara: Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan aktor-aktor politik yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, seperti politisi, pejabat pemerintah, aktivis masyarakat, dan ahli politik. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif, motivasi, dan strategi aktor politik dalam konflik dan koalisi.

4. Analisis Data:

- Data kualitatif yang dikumpulkan dari analisis dokumen dan wawancara akan dianalisis secara tematik. Peneliti akan mencari pola-pola, tema-tema, dan tren-tren yang muncul dari data, serta melakukan komparasi antar kasus untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan.
- Pendekatan analisis kasus akan digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks, dinamika, dan implikasi dari konflik dan koalisi dalam sistem politik pluralis.

5. Validitas dan Reliabilitas:

- Validitas data akan diperkuat melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi temuan dari berbagai sumber data dan metode.
- Reliabilitas analisis akan dijamin melalui konsistensi dalam interpretasi data dan pengecekan terhadap kesimpulan oleh peneliti lain atau pengamat politik independen.

6. Etika Penelitian:

- Peneliti akan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk kepatuhan terhadap privasi dan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden, serta memperoleh persetujuan etis dari institusi atau lembaga yang relevan.

PEMBAHASAN

Dalam sistem politik pluralis, konflik dan koalisi merupakan fenomena yang umum terjadi sebagai hasil dari persaingan kepentingan di antara berbagai aktor politik yang beragam. Analisis kasus-kasus kontemporer menunjukkan berbagai situasi di mana konflik dan koalisi memainkan peran kunci dalam dinamika politik suatu negara.

Pertama, kita dapat mengamati konflik dan koalisi dalam konteks pemilihan umum. Pemilihan umum seringkali menjadi momen di mana konflik politik mencapai puncaknya, dengan partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan memenangkan kursi di parlemen atau posisi kepemimpinan. Dalam beberapa kasus, terjadi konflik antara partai-partai politik yang berbeda yang berusaha merebut kekuasaan, sementara dalam kasus lain, partai-partai tersebut membentuk koalisi untuk mencapai tujuan bersama, seperti memenangkan mayoritas atau membentuk pemerintahan koalisi.

Sebagai contoh, dalam pemilihan umum di negara X, terjadi konflik antara partai-partai politik yang mewakili berbagai ideologi dan kepentingan. Partai-partai tersebut bersaing sengit untuk mendapatkan dukungan masyarakat dengan menawarkan platform dan program-program yang menarik. Namun, setelah pemilihan, partai-partai yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen dapat membentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan, tergantung pada hasil pemilihan dan kesepakatan politik antara partai-partai tersebut.

Selain itu, konflik dan koalisi juga sering terjadi dalam proses legislasi. Di parlemen atau badan legislatif lainnya, anggota-anggota politik dari berbagai partai sering kali memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini dapat menghasilkan konflik antara fraksi-fraksi partai yang berusaha mendorong agenda politik mereka sendiri. Namun, di sisi lain, anggota-anggota parlemen juga dapat membentuk koalisi lintas partai untuk mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu yang dianggap penting untuk kepentingan nasional atau konstituensinya.

Sebagai contoh, dalam proses legislasi di negara Y, terjadi konflik antara partai-partai politik yang memiliki pendekatan yang berbeda terhadap isu-isu tertentu, seperti kebijakan ekonomi atau lingkungan. Meskipun terjadi perselisihan antara partai-partai tersebut, mereka akhirnya dapat mencapai kesepakatan kompromi dan membentuk koalisi untuk mengesahkan undang-undang yang dianggap penting bagi kepentingan bersama.

Selain konflik antara partai politik, konflik dan koalisi juga sering terjadi di tingkat regional atau lokal. Di tingkat ini, aktor politik sering kali berasal dari latar belakang yang beragam, termasuk partai politik, kelompok kepentingan, atau komunitas masyarakat. Konflik dapat muncul antara kelompok-kelompok ini yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya atau pengaruh politik di tingkat regional atau lokal. Namun, mereka juga

dapat membentuk koalisi untuk mencapai tujuan bersama, seperti memperjuangkan otonomi daerah atau memperjuangkan kepentingan spesifik suatu wilayah.

Sebagai contoh, di wilayah Z, terjadi konflik antara berbagai kelompok kepentingan, termasuk kelompok etnis, agama, atau ekonomi, yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya atau pengaruh politik di tingkat lokal. Namun, mereka juga dapat membentuk koalisi lintas kelompok untuk memperjuangkan aspirasi bersama, seperti memperjuangkan pengembangan ekonomi daerah atau pemeliharaan keberagaman budaya.

Dalam beberapa kasus, konflik politik dapat mengarah pada polarisasi masyarakat dan ketegangan sosial yang meningkat. Polar isasi politik terjadi ketika masyarakat terbagi menjadi kubu-kubu yang saling bertentangan, dengan sedikit ruang untuk dialog atau kesepakatan. Hal ini dapat menghambat proses demokratisasi dan memperburuk ketegangan sosial di dalam masyarakat.

Sebagai contoh, dalam beberapa negara, terjadi polarisasi politik antara kelompok-kelompok yang mendukung pemerintah dan kelompok-kelompok oposisi. Ketegangan politik antara kedua kubu ini dapat meningkat menjadi konflik yang serius, bahkan berpotensi memicu kerusuhan atau kekerasan politik.

Namun, konflik politik juga dapat menjadi katalisator untuk perubahan positif dalam sistem politik. Konflik dapat memaksa pemerintah untuk merespons tuntutan masyarakat atau mengakomodasi aspirasi politik yang lebih luas. Selain itu, konflik juga dapat membangkitkan kesadaran politik di kalangan masyarakat dan mendorong partisipasi politik yang lebih aktif.

Sebagai contoh, gerakan sosial atau protes massa yang dipicu oleh konflik politik dapat menjadi dorongan bagi perubahan kebijakan atau reformasi politik. Dengan mengorganisir dan mengartikulasikan tuntutan mereka secara kolektif, masyarakat dapat mempengaruhi agenda politik dan memaksa pemerintah untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik.

Dalam beberapa kasus, konflik politik bahkan dapat menjadi katalisator untuk transformasi politik yang lebih besar, seperti perubahan sistem politik atau pergantian rezim. Ketika konflik politik mencapai titik kritis, mereka dapat memicu perubahan struktural dalam sistem politik yang mengarah pada transformasi sosial dan politik yang mendalam.

Sebagai contoh, revolusi atau gerakan rakyat yang dipicu oleh konflik politik dapat menggulingkan rezim otoriter dan membawa perubahan demokratisasi yang signifikan. Perubahan politik seperti ini dapat membuka ruang untuk partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif, serta memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem politik suatu negara.

Dalam analisis kasus-kasus kontemporer ini, kita dapat melihat bahwa konflik dan koalisi memainkan peran penting dalam dinamika politik suatu negara. Meskipun konflik politik sering kali dianggap sebagai sumber ketidakstabilan atau ketegangan sosial, mereka juga dapat menjadi dorongan bagi perubahan politik yang positif dan transformasi sosial yang mendalam. Oleh karena itu, penting untuk memahami kompleksitas dan dinamika konflik politik dalam konteks sistem politik pluralis.

Konflik dan koalisi dalam sistem politik pluralis juga dapat terjadi dalam konteks hubungan internasional. Negara-negara sering kali terlibat dalam konflik atau berusaha membentuk koalisi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di tingkat global. Konflik internasional dapat timbul karena persaingan kepentingan politik, ekonomi, atau ideologis antara negara-negara, sementara koalisi internasional sering kali terbentuk untuk mengatasi tantangan bersama seperti perubahan iklim, keamanan global, atau penyebaran senjata nuklir.

Sebagai contoh, konflik politik dan militer di Timur Tengah sering kali melibatkan berbagai negara yang bersaing untuk mempengaruhi perubahan politik atau mengamankan kepentingan ekonomi dan strategis di wilayah tersebut. Negara-negara regional dan kekuatan-kekuatan global sering kali terlibat dalam konflik yang kompleks dan bercabang di negara-negara seperti Suriah, Yaman, atau Libya.

Di sisi lain, koalisi internasional juga sering kali terbentuk untuk mengatasi tantangan-tantangan global yang kompleks. Sebagai contoh, Kesepakatan Paris tentang Perubahan Iklim melibatkan koalisi dari berbagai negara yang bersatu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi pemanasan global. Selain itu, koalisi-koalisi internasional juga sering kali terbentuk untuk mengatasi masalah keamanan global seperti terorisme internasional, perdagangan narkoba, atau penyebaran senjata nuklir.

Namun, konflik dan koalisi dalam hubungan internasional juga dapat menciptakan ketegangan dan ketidakstabilan di tingkat global. Persaingan kepentingan antara negara-negara besar atau blok-blok regional sering kali menghasilkan konflik yang berpotensi memicu eskalasi militer atau krisis diplomatik. Selain itu, pembentukan koalisi internasional juga dapat menimbulkan ketidakpastian dan kompetisi politik di tingkat global.

Sebagai contoh, ketegangan antara kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok sering kali memunculkan konflik dan persaingan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, militer, dan diplomasi. Negosiasi-negosiasi multilateral seperti yang terjadi dalam hubungan antara Iran dan kekuatan-kekuatan global juga sering kali melibatkan konflik dan perselisihan kepentingan yang kompleks.

Dalam konteks konflik dan koalisi di tingkat global, organisasi-organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, atau NATO memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog, negosiasi, dan kerjasama antara negara-negara anggotanya. Namun, keberhasilan organisasi-organisasi ini dalam mengatasi konflik dan mencapai konsensus sering kali tergantung pada komitmen politik dari negara-negara anggota dan kemampuan mereka untuk bekerja sama secara efektif.

Dalam analisis kasus-kasus kontemporer mengenai konflik dan koalisi dalam hubungan internasional, kita dapat melihat bahwa dinamika politik global sangat dipengaruhi oleh persaingan kepentingan antara negara-negara dan aktor-aktor politik internasional. Konflik politik dan persaingan geopolitik dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketegangan di tingkat global, sementara koalisi internasional dapat menjadi sarana untuk mengatasi tantangan-tantangan global yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk memahami kompleksitas dan dinamika konflik dan koalisi dalam

konteks hubungan internasional guna mencapai kerjasama dan perdamaian yang berkelanjutan di tingkat global.

Dalam melanjutkan pembahasan mengenai konflik dan koalisi dalam sistem politik pluralis, perlu juga dicermati bagaimana dinamika ini berperan dalam proses pembentukan kebijakan domestik dan internasional. Konflik antara kepentingan internal negara dan kepentingan negara lain seringkali menjadi faktor penting yang membentuk agenda kebijakan dan arah kebijakan suatu negara.

Pada tingkat domestik, konflik politik antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat dapat mempengaruhi proses pembentukan kebijakan. Kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi, politik, atau sosial yang berbeda sering kali bersaing untuk memengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Dalam situasi seperti ini, terbentuknya koalisi antara kelompok-kelompok kepentingan yang sejalan dapat menjadi kunci untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Sebagai contoh, dalam kasus reformasi pajak di sebuah negara, terjadi konflik antara kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda, seperti perusahaan besar, individu kaya, dan kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah. Kelompok-kelompok ini mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai perubahan kebijakan pajak dan bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi mereka secara langsung. Dalam hal ini, terbentuknya koalisi antara kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki kepentingan yang sejalan dapat menjadi strategi efektif untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam proses pembentukan kebijakan.

Di tingkat internasional, konflik dan koalisi antara negara-negara sering kali menjadi faktor penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Negara-negara sering kali terlibat dalam diplomasi dan negosiasi dengan negara-negara lain untuk mencapai tujuan-tujuan luar negeri mereka. Dalam beberapa kasus, terbentuknya koalisi antara negara-negara dengan kepentingan yang sejalan dapat memperkuat posisi mereka dalam hubungan internasional dan memengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara lain.

Sebagai contoh, dalam kasus perundingan perdagangan antarnegara, terjadi konflik dan persaingan antara negara-negara yang berusaha melindungi industri domestik mereka dan negara-negara yang menginginkan akses lebih besar ke pasar global. Dalam hal ini, terbentuknya koalisi antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dalam perdagangan internasional dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi mereka dalam perundingan perdagangan.

Selain itu, konflik dan koalisi dalam hubungan internasional juga dapat memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap isu-isu global seperti hak asasi manusia, perdamaian dan keamanan internasional, atau lingkungan hidup. Negara-negara sering kali terlibat dalam koalisi internasional untuk memperjuangkan tujuan-tujuan bersama dalam isu-isu ini, meskipun terkadang terdapat konflik di antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam isu-isu tersebut.

Sebagai contoh, dalam kasus perubahan iklim, terdapat konflik antara negara-negara yang memiliki tingkat emisi karbon tinggi dan negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Meskipun terdapat konflik dalam hal tanggung jawab dan

pembagian beban dalam mengatasi perubahan iklim, terbentuknya koalisi antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dalam perlindungan lingkungan hidup dapat menjadi langkah penting untuk memperjuangkan kesepakatan global dalam mengatasi perubahan iklim.

Kesimpulan

Dalam melihat fenomena Konflik dan Koalisi dalam Sistem Politik Pluralis, analisis kasus-kasus kontemporer menunjukkan betapa pentingnya pemahaman terhadap dinamika politik yang kompleks dan beragam dalam berbagai konteks. Konflik politik yang muncul dari persaingan kepentingan antaraktor politik, baik di tingkat domestik maupun internasional, seringkali menjadi pendorong utama dalam pembentukan kebijakan dan arah politik suatu negara.

Dalam kasus-kasus kontemporer, kita melihat bahwa konflik politik dapat berkembang dari berbagai sumber, termasuk perbedaan ideologi, kepentingan ekonomi, identitas, atau isu-isu keamanan. Namun, di tengah konflik yang terjadi, kita juga melihat adanya upaya untuk membentuk koalisi antara aktor-aktor politik yang memiliki kepentingan yang sejalan. Koalisi ini seringkali menjadi strategi untuk memperjuangkan kepentingan bersama, mengatasi tantangan yang kompleks, atau mencapai tujuan politik tertentu.

Dalam kasus-kasus domestik, konflik politik sering kali terjadi dalam proses pembentukan kebijakan di tingkat nasional, regional, atau lokal. Persaingan antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat sering kali menjadi titik pijar untuk konflik politik, sementara koalisi antara kelompok-kelompok ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat posisi mereka dalam proses politik dan pembentukan kebijakan.

Sementara itu, di tingkat internasional, konflik politik sering terjadi antara negara-negara yang bersaing untuk memengaruhi agenda global atau mencapai tujuan-tujuan luar negeri mereka. Terkadang, terbentuknya koalisi antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dapat menjadi langkah penting dalam mengatasi tantangan-tantangan global yang kompleks atau memperjuangkan tujuan-tujuan bersama dalam hubungan internasional.

Dari analisis kasus-kasus kontemporer ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Konflik dan Koalisi merupakan dua fenomena yang tidak terpisahkan dalam sistem politik pluralis. Konflik politik sering menjadi dorongan untuk perubahan politik dan pembentukan kebijakan, sementara koalisi politik sering menjadi strategi untuk memengaruhi proses politik dan mencapai tujuan politik tertentu. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dinamika konflik dan koalisi sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas dalam konteks sistem politik yang beragam dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
- Harahap, G. Y. (2001). Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus.
- Tarigan, U. (2013). Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, R. S. (2016). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning. uma. ac. id.
- Siregar, N. S. S. (2019). Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Deliana, M. (2013). Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018.
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014.
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA.
- Sianipar, G. (2019). Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (*arachis hypogaea* l.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siregar, S. A. (2018). implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan.
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara.
- Tarigan, R. S. (2017). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC).
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai.
- Siregar, N. S. S. (2002). Perkembangan Filsafat Komunikasi di Indonesia.
- Siregar, N. S. S., & Yolanda, A. (2022). Gangguan Komunikasi Self-Harm Remaja Di Masa Covid-19 Pada Desa Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang.
- Tarigan, U. (2004). Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2004). Fungsi Penataan Kearsipan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Bagian Kepegawaian Kantor Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- TELAUMBANUA, F., & Syarif, Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BANK BRI MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Wahyudi, A., & Tarigan, R. S. (2022). SISTEM INFORMASI SEKOLAH BERBASIS WEB PADA SMP NUSA PENIDA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Simarmata, O. H. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan (Roa) Dan Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Nilai Perusahaan (Per) Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2010-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Rahmawani, R. (2021). Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kerja Karyawan PT. Sinarmas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- PRATAMA, R., & Harahap, G. Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN LIVING PLAZA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).

- OKTAVIANI, R., & Syarif, Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN MERCU PADA BENDUNGAN LAU SIMEME SIBIRU-BIRU-DELISERDANG SUMATERA UTARA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2018). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan.
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Get Press Indonesia.
- Angelia, A. (2022). Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.
- Batubara, B. M., Humaizi, H., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022, November). Poverty reduction program in Medan city: Public policy perspective. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing.
- Dewi, R., & Muda, I. (2013). Fungsi Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.
- Lubis, Y. A., & Batubara, B. M. (2020). Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level. In Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia.
- Harahap, G. Y. (2020). Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia. Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal, 2(3), 394-404.
- Hartono, B. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang).
- Rejeki, R. (2019). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Santoso, M. H. (2021). Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues.
- Tarigan, U. (2016). Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U. (2012). Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh).
- Tarigan, U. (2004). Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamso Medan.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Sembiring, W. M. (2023). Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli.
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB. Retrieved from osf.io/3jpdtd.
- Wuri Andary, R. (2015). Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri I Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan).
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan.

- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing.
- Tarigan, U. (2004). Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kurniawan, M. Y. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO).
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai.
- Siregar, N. S. S. (2017). Modul Praktikum Publik Speaking.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial.